

## Politik Keadilan: Peran Politik Gereja di Masa Kini

### Penulis:

Jordan Pakpahan

Dosen STT-HKBP  
Pematang Siantar

### Afiliasi:

STT-HKBP Pematang  
Siantar

### Email:

dann.pakpahan23@gmail.com

© JORDAN PAKPAHAN

**Loko Kada** Jurnal Teologi  
Kontekstual & Oikumenis  
Vol. 02, No. 02, September  
2022

### Abstrak

Dalam konteks kekuasaan yang tidak adil, hegemonis dan opresif, gereja tertantang untuk menjadi tidak hanya pewarta kritis keadilan bagi semua orang, namun juga mestinya menjadi pembangun aktif keadilan melalui institusinya maupun kehidupan sosial dan politik warganya di semua lini kehidupan. Semua orang Kristen terpanggil untuk menyadari sepenuhnya bahwa mewujudkan iman Kristen tidak terbatas oleh dinding-dinding gereja, namun harus mencakup wilayah politik (pemerintah). Sebagai komunitas Kristen, gereja dapat berdialog dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menjawab problem-problem kehidupan masyarakat. Termasuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dengan mendengar kritik profetis, konstruktif dan edukatif dari gereja, pemerintah dapat menjalankan kekuasaan berbasis keadilan.

*Keywords: keadilan, politik, gereja*

### A. Globalisasi, Krisis Ekologis dan Ketidakadilan

Kita berada di bawah kanopi globalisasi. Globalisasi sebagai arus zaman punya dimensi sosial, politik, budaya dan ekonomi. Sebagai sebuah sistem, globalisasi merupakan keseluruhan proses yang dapat mengubah keadaan hidup secara global maupun lokal. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal misalnya, berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dunia dan juga komunitas lokal.<sup>1</sup> Ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan bahkan alienasi sosial adalah dampak-dampak besar dari sistem tersebut. Imperialisme global<sup>2</sup> muncul dalam bentuk korporasi multinasional yang wilayah

<sup>1</sup>Manfred B. Steger, *Globalization. A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2003), h. 8

<sup>2</sup>Ernesto Scapenti, *Global Imperialism and the Great Crisis Uncertain Future of Capitalism* (New York: Monthly Review Press, 2014), 9-11

operasinya tak terbatas. Bahkan cengkeraman kuasanya melampaui batas-batas politik yang ditentukan oleh pemerintah. Sering raksasa-raksasa korporasi ini memposisikan diri di atas pemerintah. Kuasa pemerintah ditundukkan ke bawah kepentingan mereka dan posisi pemerintah sering lebih berpihak kepada para pebisnis. Alasannya kurang lebih untuk menjaga postur anggaran yang memang ditopang oleh kapital, dana CSR, dan pajak dari korporasi-korporasi besar itu.

Kehadiran korporasi-korporasi transnasional memang perlu untuk menopang jalannya ekonomi. Itu juga mendukung ekonomi masyarakat setempat. Namun seringkali kehadiran mereka menyebabkan dampak buruk yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan hidup. Kajian terbaru WALHI mencatat bahwa entitas korporasi-korporasi multinasional sebagai bagian dari ekonomi kapitalistik telah melahirkan ketimpangan penguasaan lahan, pelanggaran hak asasi manusia dan alam, monopoli kekayaan dunia oleh segelintir orang, arogansi impunitas korporasi, dan bencana ekologis. WALHI menemukan adanya unsur-unsur kejahatan *ecocide* dalam bencana lumpur panas Lapindo, Sidoarjo.<sup>3</sup>

Kehadiran PT Toba Pulp Lestari di wilayah Kabupaten Tobasa menimbulkan berbagai masalah, misalnya terkait pemanfaatan lahan tanpa sosialisasi, konsultasi dan persetujuan masyarakat adat setempat, penebangan hutan kemenyan yang adalah hutan adat, dan perluasan kawasan dengan melakukan penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur hijau).<sup>4</sup> Ekspansi hutan tanaman industri oleh PT Toba Pulp Lestari menyebabkan konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi konflik juga terjadi antarkelompok dalam masyarakat dan menimbulkan sulitnya akses terhadap sumber kehidupan termasuk ancaman terhadap hilangnya sumber penghidupan.

Dampak-dampak buruk secara sosial dan ekonomi dari kehadiran korporasi-korporasi besar seperti PT. TPL tidak terlepas dari adanya 'hubungan mesra' antara pemerintah, tokoh masyarakat dan korporasi besar tersebut. Pejabat-pejabat publik di aras lokal maupun nasional juga bermasalah karena banyak dari mereka yang tersandera oleh kepentingan politik dan ekonomi pribadi dan kelompok. Konteks krisis keadilan dan krisis ekologis tentu berkaitan erat dengan peran politis gereja di ruang publik yang sering dianggap kurang penting dan dianggap perifer saja.

## B. Keadilan di dalam Alkitab

Di dalam Alkitab *sedaqa* merupakan keadilan dan kebenaran yang berkaitan dengan aksi konkret yang tepat dan benar. *Sedaqa* juga bermakna sebagai memberi bantuan kepada orang miskin. Tentu, tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi hidup kaum miskin. Aksi

---

<sup>3</sup>M. Ridha Saleh, dkk., *Ecocide. Memutus Impunitas Korporasi* (WALHI, 2019), h. 9-10,12, 39-40, 51-52,53 *Ecocide* adalah sistem eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus hingga mengarah pada pemusnahan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia.

<sup>4</sup>Muhammad Kosar, "Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Lingkungan dan Maraknya Konflik" dalam *Intip Hutan*, Desember 2015, hal. 12-13.

konkret dapat berbentuk perumusan regulasi pro rakyat oleh pemegang kuasa. Juga aksi memberi bantuan hukum bagi kaum miskin.<sup>5</sup> Raja dan hakim sebagai aktor-aktor penegak keadilan bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka harus menjalankan fungsinya dengan benar yakni menciptakan hukum dan memastikan penerapannya.<sup>6</sup> Artinya Keadilan terkait erat dengan tugas hakim atau raja sebagai yang membebaskan orang tertindas dari penindasnya. Dan membebaskan budak dari yang memperbudaknya.

Keadilan di dalam Alkitab juga berkaitan dengan isu-isu sosio-ekonomi. Keadilan (*mispāt*) merupakan sikap yang benar untuk melindungi orang yang rapuh dari penindasan. Keadilan menjadi antithesis dari penindasan dan ketidakadilan. Keadilan merupakan aksi untuk menghadirkan kebenaran secara konkret. Aksi keadilan ini berguna mencegah orang kuat (sosio-ekonomi) yang hendak meniadakan hak-hak orang yang rapuh. Semua orang wajib belajar untuk melakukan kebaikan, menegakkan keadilan, melepaskan orang tertindas, membela yatim-piatu dan janda-janda miskin (Yes. 1.17; 56.1; 61.8; Mik. 6.8).<sup>7</sup>

Menurut peristiwa Exodus keadilan bersumber dari Allah. Dia adalah Allah yang bertindak membebaskan kaum budak Israel dari rumah perbudakan Firaun di Mesir. Aksi Allah yang membebaskan dianggap sebagai penegakan keadilan yang berkaitan dengan dimensi politis. Karena Allah melalui Musa harus berkonfrontasi dulu dengan kekuasaan imperium Mesir yang menindas dan memperbudak. Itu merupakan jalan resistensi untuk memulai pembebasan kaum budak Israel dari penindasan/perbudakan dan menuntun mereka ke tanah pembebasan (*land of freedom*). Peristiwa Exodus dirancang untuk menciptakan sebuah bangsa yang bebas dari penindasan dan pemiskinan. Sebuah masyarakat alternatif yang adil dan terberkati yang berbeda dari masyarakat dunia. Di dalam masyarakat seperti ini semua orang apakah orang miskin, janda, orang asing dan anak yatim-piatu, termasuk budak memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera.

Peristiwa pembebasan Exodus bukanlah peristiwa yang sudah memfosil. Peristiwa itu pun kembali dikenang dalam rangka melahirkan pembebasan yang baru bagi umat Israel (Im. 25.1-13). Ingatan akan Allah yang membebaskan dari perbudakan menjadi inti kredo Israel. Ingatan itu dihidupkan terus termasuk lewat hukum tahun Sabat dan Yobel. Kegagalan melaksanakan tahun pembebasan dapat berakibat fatal. Dalam perspektif Yeremia, kegagalan memenuhi tahun Yobel menjadi penyebab terjadinya pembuangan (*exilic*). Sehingga penyelenggaraan pembebasan merupakan sebuah keharusan. Cita-cita luhur tahun Yobel – Pembebasan itu bukanlah utopia (harapan) yang tidak mungkin. Yobel disuarakan untuk mengkonfrontasi masyarakat kelas yang egoistis dan mencita-citakan masyarakat tanpa kelas. Yobel membuka ruang yang luas bagi

<sup>5</sup>Moshe Weinfeld, "Justice and Righteousness - The Expression and Its Meaning," dalam *Biblical Themes and Their Influence*, ed. by Henning Graf Reventlow/Yair Hoffman (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992), h.236-237.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 245-246.

<sup>7</sup>Samuel L. Adamas, "The Justice Imperative in Scripture," dalam *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*, 2015, Vol 69, h. 402.

mereka yang miskin, yang tidak punya tanah, yang diperbudak hutang. Orang kaya yang punya banyak tanah dibatasi kekuasaannya lewat tahun Yobel. Mereka dipanggil untuk menjalankan keadilan bagi orang tertindas dan tak berpunya.

Peristiwa pembebasan Exodus kembali dirayakan di dalam cita-cita mesianik eskatologis Yesus Kristus. Yesus mengumandangkan misi profetisnya demikian: “Aku diutus untukewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk. 4.16-20). Di dalam diri Yesus nubuatan dari Yesaya (Yes.61.-1-2) sudah digenapi (Luk. 4.21). Yobel Raya yang dinubuatkan Daniel pun (9.24-27) dikaitkan erat dengan misi profetis dan mesianik Yesus. Yesus sendiri di dalam diri-Nya ‘menahbiskan’ zaman mesianis Yobel Raya. Ketika Yohanes Pembaptis menyelidiki apakah Yesus adalah Mesias Allah? Yesus menyampaikan pesan kuat kepada Yohanes Pembaptis dengan kata-kata profetis Yesaya sendiri: “orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku” (Luk. 7.22 = Yes. 35.5-6; 61.1).

Seluruh karya pelayanan Yesus menjadi penanda bahwa era mesianis yang eskatologis sudah di inisiasi. Itu menjadi bukti nyata bahwa Allah berkehendak mewujudkan Kerajaan Allah di dalam diri Yesus. Pembebasan –yang termuat dalam tahun Yobel- sudah dimaklumkan oleh Yesus secara radikal, karena Yesus mewujudkan sepenuhnya karya pembebasan yang meliputi seluruh manusia, tanah, dan seluruh alam-ciptaan di dalam diri-Nya. Dalam hidup, mati dan kebangkitan-Nya Yesus Kristus memeteraikan pembebasan manusia secara integral dan holistik. Manusia dibebaskan bukan saja dari dosa personal dan dosa kolektif tetapi bahkan dari dosa struktural. Dan manusia disadarkan untuk berjuang terus membebaskan diri dari semua sistem dan struktur kuasa-kuasa yang memperbudak. Keadilan atau bersikap adil merupakan sifat hakiki Allah. Keadilan (*sdaqqa*), kesetiaan (*emet*), pertimbangan dan aksi ilahi (*mispāt*) merupakan manifestasi kasih Allah. Allah mengasihi dengan mengampuni orang berdosa dan membela yang tak berdaya. Namun Allah juga menunjukkan murka dan kemarahannya kepada para penindas yang tidak mau bertobat. Kemarahan ilahi bermaksud membebaskan para korban penindasan dari para penindas, dan membebaskan para penindas dari dosa dan perilakunya yang menindas.

### C. Relasi Kritis Gereja dengan Pemerintah

Keberadaan gereja dan pemerintah (negara) sebagai dua otoritas tidak perlu lagi dipertentangkan.<sup>8</sup> Keduanya cukup dibedakan tetapi tidak

<sup>8</sup>Lih. Martin Luther, “Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed,” dalam *Martin Luther’s Basic Theological Writings*, ed. by Timothy F. Lull (Minneapolis: Fortress Press,

untuk dipisahkan secara ekstrem. Keberadaan gereja tidak dapat dipisahkan dari negara/pemerintah, demikian sebaliknya. Baik gereja dan pemerintah memiliki kuasa, fungsi dan wilayahnya masing-masing. Pemerintah duniawi merupakan alat Allah untuk memajukan dan membangun masyarakat yang adil makmur dan adil. Pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang berasal dari Allah. Umat Kristen dipanggil untuk patuh kepada pemerintah yang bertanggung jawab. Umat Kristen dapat melakukan tugasnya sebagai warga negara yang baik dengan turut serta membangun dan memelihara keadilan dan kedamaian bagi semua. Dan gereja sebagai alat anugerah Allah dipanggil untuk memberitakan Injil Allah yang membebaskan manusia dari dosa menuju kemanusiaannya yang baru. Baik gereja maupun pemerintah menerima kuasa dari Allah untuk saling membantu mewujudkan kehendak Allah. Tetapi, gereja harus tetap punya jarak kritis dari pemerintah agar selalu dapat menyuarakan suara kritis profetisnya terhadap pemerintah yang berkuasa secara lalim dan tiran, yang gagal memajukan keadilan dan kepentingan umum.

Hubungan antara gereja dan negara dalam bingkai NKRI sudah paripurna dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Politik dan sistem pemerintahan Indonesia berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 serta demokrasi modern. Batasan hubungan antara negara dan agama sudah cukup jelas termuat dalam sila pertama Pancasila dan UUD 1945, fasal 29. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 negara Indonesia mengakui bahwa agama dan kebebasan beragama merupakan pemberian Tuhan. Bahkan penegakan keadilan bagi seluruh rakyat menjadi satu dari tujuan penting keberadaan negara. Dalam bingkai itu gereja dan negara harus ditempatkan sejajar, saling membantu, melengkapi dan memberdayakan satu sama lain. Posisi gereja, seperti Darwin Lumban Tobing tekankan, tidak menjadi sub-ordinasi atau *onderbouw* negara. Demikian juga sebaliknya. Dunia adalah tempat dan lapangan pelayanan dan kesaksian gereja, termasuk negara dan bangsa.<sup>9</sup>

Gereja di Indonesia tentu memahami dirinya sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Dan bersama dengan warga masyarakat beragama lain gereja melibatkan diri dalam membangun negara ini, mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Dengan demikian pewartaan Injil oleh gereja di Indonesia menjadi berkat secara konkret. Gereja tidak boleh hanya menjadi penonton dan sekedar pengamat dalam kehidupan berbangsa. Namun kehadiran gereja di dunia mendasarkan dirinya pada

---

1989), h. 655-703 Bagi Luther orang Kristen diatur oleh Allah melalui dua kerajaan (*zwei Reiche*), yakni kerajaan rohani (*geistliche Reich*) dan kerajaan duniawi (*weltliche Reich*). Di Kerajaan rohani Yesus Kristus memerintah melalui firman-Nya, dan bekerja melalui gereja. Kerajaan ini mengatur bagian jiwa/spiritualitas manusia, menguduskannya, serta membebaskannya dari semua kuasa dan kekuasaan. Sementara itu kerajaan temporal memerintah bagian eksternal manusia, mencakup hal-hal duniawi. Membangun tatanan, perdamaian, melindungi kehidupan dan harta milik manusia merupakan tugas dari para penguasa duniawi yang menerima mandatnya dari Tuhan. Para penguasa ini dimasukkan ke dalam kelompok pejabat dan penguasa politik.

<sup>9</sup> Darwin Lumban Tobing, *Teologi di Pasar Bebas* (Pematang Siantar: L-Sapa, 2007), h. 267, 268.

ketaatan kepada Tuhan di atas segalanya.<sup>10</sup> Atas dasar itu gereja perlu mengembangkan sikap kritisnya terhadap pemerintah yang lalai dalam memberi keadilan bagi rakyatnya. Tidak hanya terhadap pemerintah, gereja pun juga harus bersikap kritis terhadap poros kekuasaan lainnya seperti penguasa pasar dan komunitas-komunitas yang menentukan terwujudnya keadilan sosial.

Tugas gereja tidak dapat begitu saja dibatasi sesuai keinginan pemerintah sipil. Gereja tidak boleh mengabsorpsi dirinya sepenuhnya dengan pemerintah. Tetapi ia harus mengambil jarak kritis dengannya, lalu menyampaikan bahasa yang baru, menunjukkan horizon baru, serta mengusulkan jalan alternatif atas problem-problem masyarakat. Kehidupan ibadah gereja sebagai masyarakat alternatif menjadi kekuatan untuk membentuk ulang masyarakat sipil. Pembentukan ulang tersebut bisa terjadi ketika orang awam Kristen dengan seluruh gerak hidup ibadahnya menginfus tatanan temporal dengan nilai-nilai Kristen. Dan relasi gereja yang konstruktif dan rekonsiliatif dengan komunitas beragama lainnya menjamin terbentuknya kohesifitas sosial yang solider serta pembangunan kesejahteraan sosial yang adil.

#### **D. Gereja dan Penyelenggaraan Keadilan**

Gereja memang berada di dunia tetapi tidak berasal dari dunia. Gereja diutus ke dunia oleh Yesus Kristus untuk membawa keselamatan bukan hanya bagi gereja tetapi bagi dunia. Sejatinya tugas gerejalah mentransformasi dunia menjadi seturut gambar ideal yang dikehendaki oleh Allah. Tugas dan tanggungjawab gereja utamanya terdiri dari panggilan Allah untukewartakan Injil Kerajaan Allah dari Yesus Kristus. Dan melaksanakan perayaan sakramen bagi keselamatan seluruh manusia dan dunia. Kedua tugas tersebut yakni tugasewartakan Firman dan pelayanan sakramen bagi gereja-gereja Protestan menjadi penanda keberadaan gereja yang benar di dunia (*the marks of the church*). Dalam konteks Indonesia gereja-gereja harus menyambut agama-agama dan budaya-budaya lain untuk bekerja bersama dalam menghadapi tantangan ketidakadilan, kemiskinan yang parah, penderitaan, dan kerusakan ekologis.

Gereja-gereja ditantang untuk sadar akan konteks dimana ia ada dan hidup. Berbagai persoalan yang ada di dalam konteks gereja lokal harus dipetakan melalui analisis sosial, ekonomi dan politik. Gereja-gereja ditantang untuk secara bijaksana menemukan metode untuk merespon konteks interaksi agama-agama yang memang penuh dengan ketegangan. Dan bersedia membangun sikap dialog yang terbuka mengadakan pertukaran pengetahuan agama dan wawasan kemanusiaan. Tujuannya bukan untuk saling mengklaim superioritas kebenaran agama masing-masing, melainkan menemukan ajaran inti masing-masing yang dapat dijadikan dasar dan titik temu bersama menginisiasi terjadinya kerjasama

---

<sup>10</sup>Mangisi S. E. Simorangkir, *Ajaran Dua Kerajaan dan Relevansinya di Indonesia*, (Kolportase Pusat GKPI: 2008) h, 152, 153.

dan tanggungjawab sosial bersama dalam memajukan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Gereja-gereja sebagai bagian dari gerakan ekumenis dipanggil untuk menjawab berbagai tantangan zaman seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, penderitaan dan dehumanisasi. Gereja harus memposisikan diri secara kritis dan bertanggung jawab berhadapan dengan pemerintah. Pelayan dan anggota jemaat merupakan bagian dari komponen bangsa, tetapi bukan alat dan objek kekuasaan pemerintah. Gereja tidak akan mampu menyampaikan kritik profetisnya terhadap pemerintah yang bertindak tidak adil ketika gereja tersandera oleh kekuasaan para pejabat politik yang adalah warga gereja, tersandera oleh gratifikasi dan pemberian yang bermotif politis. Peristiwa munculnya kasus korupsi yang membelit pejabat politik beragama Kristen menantang gereja untuk merumuskan ulang pelayanannya terhadap para politisi, pendidikan politik terhadap warga gereja serta pembekalan politik Kristen terhadap warga-warga gereja yang muda yang kelak menjadi pejabat-pejabat politik di pemerintahan dan kepartaian.

Merupakan sebuah kebutuhan mendesak bagi gereja dan warganya untuk mengembangkan kultur protes dan resistensi non-kekerasan untuk mewujudkan tugas pewartaannya di tengah-tengah dunia. Para pelayan gereja pun sudah saatnya bersikap kritis, kreatif dan konstruktif dalam menyikapi berbagai problem sosial yang mendera rakyat kecil dan miskin. Sikap seperti itu memungkinkan mereka menyampaikan kritik konstruktif terhadap orang-orang Kristen yang berada di dalam struktur politik, pemerintahan termasuk perusahaan-perusahaan lokal. Kehadiran mereka di sana perlu dipersoalkan apakah mereka menunjukkan kehadiran yang mentransformasi kultur politik dan pemerintahan atau justru kehadiran yang menjadi bagian dari kultur koruptif dan manipulatif yang memproduksi kemiskinan dan marginalisasi kaum miskin.

### **E. Peran Politis Gereja Mentransformasi Dunia**

Teologi Kristen merupakan pembacaan dan refleksi kritis atas konteks kehidupan manusia yang diperhadapkan dengan Firman Tuhan. Teologi memang memuat tidak hanya dimensi sosial, ekonomi dan budaya, tetapi juga politik. Politik yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan kota, komunitas, tempat hidup, kuasa, pemerintah, kebijakan publik, tatanan dan sistem-sistem politik seperti demokrasi, dan seterusnya. Anggapan beberapa orang bahwa tabu bagi gereja membicarakan politik adalah anggapan yang keliru kalau bukan sesat. Intensi yang lebih berbahaya dibalik anggapan itu sengaja atau tidak bermaksud menjauhkan gereja dari peran pastoralnya untuk membebaskan tatanan politik dari ideologi-ideologi negatif yang memproduksi perilaku korupsi, diskriminasi, ketidakadilan, ketimpangan sosial. Oleh karena itu tugas gereja bukan saja berefleksi kritis tentang isu-isu politik, tetapi juga terlibat aktif dengan mentransformasi masyarakat menuju keadilan, ekualitas dan kesejahteraan melalui seluruh kehidupan ibadahnya.

Pelayanan gereja juga mencakup wilayah politik. Tetapi bukan berarti untuk melayani di wilayah politik para pelayan gereja lantas terjun masuk ke dalam politik praktis. Ketika pelayan gereja memasuki ranah

politik praktis dengan menjadi wakil rakyat atau pemimpin daerah, maka mereka harus sadar benar bahwa baik buruknya gambar pelayan gereja diletakkan di atas pundak mereka. Ketika dalam menjalankan tugas politiknya mereka tidak lebih baik dari politisi yang Kristen awam, bahkan justru menunjukkan kinerja yang lebih buruk dari mereka, maka mereka jelas-jelas bukan saja telah merusak gambar pelayan gereja, tetapi juga memberi contoh buruk yang menyebabkan malapetaka politis. Jika terjadi demikian maka motif-motif dibalik tujuan para pelayan yang menceburkan diri ke dalam politik praktis baiknya dikritisi dari perspektif teologi politik Kristen, karena motif-motifnya bisa saja berbasis kepentingan pribadi yang terkait erat dengan hasrat kekuasaan, status sosial, termasuk orientasi material. Peran gereja menjadi sangat penting di sini untuk menuntun para pelayan gereja yang menjadi politisi untuk membuktikan diri menjadi pembawa transformasi ke dalam tatanan politik dan struktur masyarakat.

Problem besar lain adalah bahwa banyaknya pejabat politik beragama Kristen di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Kristen tidak dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Ketika di dalam struktur dan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah seperti itu yang tampak adalah praktek kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang buruk, ketimpangan sosial yang menganga, kemandegan pembangunan, dan perilaku korupsi serta tumpuhnya nalar kritis rakyat, maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana gereja mereformasi secara radikal pemahamannya akan dirinya, relasinya dengan pemerintah dan rakyat yang dilayaninya, serta praxis pelayanannya agar kehadirannya benar-benar berdampak transformatif bagi seluruh jemaat yang dilayaninya. Karena kegagalan para politisi dan pejabat Kristen dalam menjalankan kuasa dan tugas jabatannya secara Kristiani bisa saja terkait dengan orientasi pelayanan gereja yang salah, rendahnya tingkat spiritualitas mereka, yang terkait dengan minimnya pemahaman tentang hubungan tak terpisahkan antara praxis iman dan politik sekuler. Persoalan terbesar yang harus dijawab oleh semua pejabat dan politisi Kristen adalah bagaimana mereka menemukan kontinuitas konkret antara pengakuan iman Kristennya dengan penerapan kuasa jabatan (politik) yang sedang dipikulnya.

Dalam kesadaran politis para politisi dan pejabat publik tampaknya masih mengeras pendikotomian antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani, antara yang suci dengan yang profan, antara kerajaan sorgawi dengan kerajaan duniawi. Kebanyakan mereka masih menganggap bahwa urusan politik dan pemerintahan (termasuk diskursus tentangnya) merupakan wilayah kekuasaan pejabat politik dan pemerintah semata. Sehingga, gereja serta para pelayannya dipahami sebagai yang tidak perlu mencampuri urusan politik dan pemerintahan, karena wilayah pelayanan mereka terbatas hanya di dalam gereja dan jemaat yang dilayaninya saja. Kesadaran seperti itu tidak jarang juga tercermin di dalam pemikiran dan pandangan para pelayan gereja. Sikap apatis dan bungkam dari pelayan gereja dalam menyikapi situasi



pemerintahan yang korup, buruknya pelayanan publik pemerintahan, termasuk kerusakan parah berbagai infrastruktur seperti sekolah-sekolah dan jalan-jalan di daerah-daerah merupakan tanda-tanda nyata dari kesadaran yang miskin itu. Pengentalan antithesis antara gereja dan negara di benak para pejabat pemerintah yang beragama Kristen dan para pelayan gereja dapat melahirkan pemahaman bahwa tugas mewartakan Firman merupakan tugasnya para pelayan gereja dan tugas itu tidak ada kaitannya dengan para pejabat politik dan pemerintahan. Padahal, berdasarkan imamat universal orang percaya semua orang Kristen – apakah pelayan gereja atau pejabat politik – yang sudah dibaptis dan yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk mewartakan Firman dan menjalankan praxis imannya dalam segenap kehidupan di manapun dan kapanpun.

Seperti jemaat Kristen perdana, gereja tidak perlu mengurung diri di dalam tembok gereja. Sejak awal jemaat Kristen perdana meski sebagai minoritas yang sering terpojok ke tepian pemerintahan. Namun gereja tidak lantas menghentikan misinya. Ia tidak menjalankan misinya secara tertutup. Tidak menjadikan misi sebagai urusan privat dan terbatas dalam dinding komunitas. Tetapi hidup gereja harus dibawa ke jantung kehidupan publik untuk tujuan transformasi dunia. Peran publik gereja tidak untuk mendukung yang berkuasa tanpa syarat. Gereja harus bekerja sama dengan pemerintah dalam relasi yang kritis dan konstruktif, karena ada saat dalam kasus kekecualian gereja harus berbeda pendapat dengan pemerintah, dan memposisikan diri sebagai pemberi kritik dan solusi konstruktif demi mewujudkan keadilan bagi semua komunitas. Bahkan, misi gereja di ruang publik – menurut spirit pelayanan Yesus – justru harusnya lebih berpihak kepada kaum miskin dan kecil dari masyarakat ketimbang kelompok elit dan kaya. Semangat misi seperti itu oleh LWF disebut dengan istilah ‘misi dari pinggiran’ dan ‘diakonia orang pinggiran.’<sup>11</sup>

Misi dari pinggiran dimaksud untuk menjawab ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan. Paradigma pelayanan diakonia sudah bergeser. Dulu pelayanan dilakukan oleh yang kuat kepada yang lemah, yang kaya kepada yang miskin. Model seperti ini masih memuat unsur superioritas-inferioritas dan cenderung memposisikan kaum miskin sebagai yang berstatus rendah dan kurang berharga. Misi dari pinggiran bermaksud memberikan tempat sentral bagi kaum miskin, sehingga mereka memiliki akses penuh kepada semua sumber daya yang menuntun mereka meraih hak-haknya dan kodrat utuh kemanusiaannya. Gereja di dalam misi seperti ini mendampingi kaum miskin dengan menggugat orang/kuasa/sistem/pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab, dan yang menjadi penyebab kaum miskin tetap miskin dan berada di pinggiran. Gereja dipanggil untuk mentransformasi struktur-struktur kekuasaan yang memproduksi kemiskinan dan ketidakadilan di dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup>World Council of Churches, *Resource Book: WCC 10<sup>th</sup> Assembly* (Busan: WCC Publications, 2013), h. 58-63, 106-108.

Membangun keadilan merupakan panggilan bagi setiap orang Kristen. Panggilan tersebut sebuah keharusan berdasar pada keadilan Allah bagi semua. Apalagi keadilan<sup>12</sup> memang bersifat relasional, kreatif, pro-kehidupan dan membebaskan. Pemahaman seperti itu memberi inspirasi bagi semua orang Kristen untuk membangun relasi-relasi yang adil di dalam masyarakat. Untuk menciptakan komunitas alternatif, membebaskan orang-orang miskin dan tertindas, serta resistensi atas struktur kekuasaan yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan (*resistensi non-kekerasan*). Resistensi non-kekerasan ini sangat penting sebab tanpanya berbagai ketidakadilan akan terus merajalela, dan merusak relasi manusia dengan Tuhan, merusak relasi manusia dengan sesamanya manusia, dan merusak relasi manusia dengan lingkungan hidup. Kritisisme dan resistensi dapat dilakukan melalui pewartaan, pengajaran, perayaan ibadah, pelayanan diakonia, pembentukan komunitas, dan kerjasama dengan semua komunitas beragama. Gereja – yang berjuang membela kaum miskin dan tertindas, yang menyampaikan protes dan resistensi atas kuasa-kuasa dan kebijakan-kebijakan yang tidak adil– memang kadang harus menanggung resiko kehilangan status sosial dan politiknya di hadapan publik. Resiko seperti itu harus ditempuh demi menunjukkan bahwa gereja memang benar tubuh Kristus, dan demi terselenggaranya keadilan yang mentransformasi dunia.

### Daftar Pustaka

- Adamas, Samuel L. 2015. "The Justice Imperative in Scripture," dalam *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*
- Hollenbach, David. 1982. "The Church in the World: The Politics of Justice," dalam *Theology Today*, Vol. 38, Jan 1.
- Kosar, Muhamad. 2015 "Peran Perbankan Terhadap Ekspansi Industri dan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Lingkungan dan Maraknya Konflik" dalam *Intip Hutan*
- Lumban Tobing, Darwin. 2007. *Teologi di Pasar Bebas*. Pematang Siantar: L-Sapa.
- Luther, Martin. 1989. "Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed," dalam *Martin Luther's Basic Theological Writings*, ed.by Timothy F. Lull. Minneapolis: Fortress Press.
- Saleh, M. Ridhadkk, 2019. *Ecocide. Memutus Impunitas Korporasi WALHI*
- Scrapenti, Ernesto. 2014. *Global Imperialism and the Great Crisis Uncertain Future of Capitalism*. New York: Monthly Review Press.
- Simorangkir, Mangisi S.E. 2008. *Ajaran Dua Kerajaan dan Relevansinya di Indonesia*, Kolportase Pusat GKPI.
- Steger, Manfred B. 2003. *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Weinfeld, Moshe. 1992. "Justice and Righteousness - The Expression and Its Meaning," dalam *Biblical Themes and Their Influence*, ed. by Henning Graf Reventlow/Yair Hoffman. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- World Council of Churches. 2013. *Resource Book: WCC 10<sup>th</sup> Assembly*. Busan: WCC Publications.

---

<sup>12</sup>David Hollenbach, "The Church in the World: The Politics of Justice," dalam *Theology Today*, Vol. 38, Jan 1, 1982, h. 489-493